

INTERNAL AND EXTERNAL CONFLICT IN THE POLITICS OF THE ISLAMIC MATARAM KINGDOM DURING THE REGION OF KING AMANGKURAT I (1646–1677)

Konflik Internal Dan Eksternal Dalam Politik Kerajaan Mataram Islam Pada Masa Pemerintahan Raja Amangkurat I (1646–1677)

Beriqtian Fernanda ^{1a}, Fahrudin^{2b}(*)

¹²Universitas PGRI Yogyakarta

^aberiqtianfernanda292@gmail.com

^bfahrudin@upy.ac.id

(*) Corresponding Author

fahrudin@upy.ac.id

How to Cite: Beriqtian Fernanda. (2024). Konflik Internal Dan Eksternal Dalam Politik Kerajaan Mataram Islam Pada Masa Pemerintahan Raja Amangkurat I (1646–1677) doi: [10.36526/js.v3i2.4676](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4676)

Received : 12-11-2024

Revised : 11-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Keywords:

internal conflict,
external conflict,
political, islamic
mataram kingdom

Abstract

The reign of Amangkurat I (1646–1677) in the Islamic Mataram Kingdom was marked by significant internal and external political conflicts that shaped the trajectory of the kingdom. Internally, the centralized and authoritarian policies of Amangkurat I sparked discontent among court nobles and regional leaders, leading to rebellions and power struggles within the kingdom. Externally, the kingdom faced pressures from expanding European colonial powers, particularly the Dutch East India Company (VOC), which exploited internal divisions to strengthen their influence. This study examines the dynamics of these conflicts, their causes, and their impacts on the stability and governance of the Mataram Kingdom. The findings highlight the interplay between internal factionalism and external intervention, which ultimately contributed to the weakening of Mataram's sovereignty during this turbulent period.

PENDAHULUAN

Kerajaan Mataram, yang didirikan oleh Panembahan Senopati, muncul sebagai penerus Kerajaan Pajang. Selama masa kekuasaan Panembahan Senopati, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Setelah wafatnya Panembahan Senopati, kekuasaan Mataram diteruskan oleh putranya, Panembahan Sedo Ing Krapyak, yang dikenal aktif dalam melaksanakan berbagai pembangunan. Raja ketiga, Sultan Agung, adalah seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berhasil menaklukkan banyak wilayah, hingga hampir seluruh Pulau Jawa berada di bawah kendalinya, termasuk Palembang dan sebagian Kalimantan. Namun, setelah masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami penurunan..(Kepada & Adab, 2008)

Amangkurat I naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Agung, pada tahun 1646, di tengah harapan untuk meneruskan kejayaan Mataram. - Berbeda dari ayahnya, Amangkurat I memiliki kebijakan yang lebih cenderung represif dan otoriter terhadap bangsawan dan rakyatnya. Perubahan gaya kepemimpinan yang berubah lebih sentralistik dan diktator dengan memusatkan kekuasaan sepenuhnya pada dirinya dan menghapuskan banyak otonomi daerah. - Ambisi Amangkurat I untuk mengontrol seluruh kerajaan secara langsung tanpa mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan.

Pada masa pemerintahan Amangkurat Agung, kebijakan kerajaan mengalami perubahan arah. Berbeda dengan ayahnya yang menentang VOC, Amangkurat Agung justru membangun aliansi dengan mereka dan mendapatkan dukungan penuh dari VOC.(Siswanta, 2019). Pada masa pemerintahan Amangkurat I, Kerajaan Mataram mulai mengalami penurunan kekuatan. Wilayah

kekuasaannya perlahan-lahan berkurang karena direbut oleh VOC. (Aulia Arif Rahman, 2012), sementara itu ayahnya Sultan Agung mencapai kemajuan politik yang signifikan, dengan upaya menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan melancarkan serangan terhadap Belanda di Batavia. Menjelang akhir masa pemerintahannya, ia menetapkan aturan untuk mencegah perselisihan mengenai perebutan takhta antara keluarga kerajaan dan putra mahkota. Di bawah kepemimpinannya, Mataram tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. (Andrisijanti, 2015)

Kerajaan Mataram bermula dari sebidang tanah perdikan yang dianugerahkan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya membantu Sultan mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Tanah tersebut berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mentaok. Dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun, Ki Pemanahan mengelola dan membangun wilayah tersebut hingga menjadi pusat kekuasaan baru yang dinamai Kota Gede. Setelah mendirikan Mataram, Ki Pemanahan mulai menyebut dirinya sebagai Ki Ageng Mataram, meskipun pada saat itu Mataram masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang.

Seiring waktu, Mataram berkembang menjadi kerajaan yang lebih besar dibandingkan Pajang di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 M, kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh putranya, Sutawijaya, yang dikenal sebagai seorang ahli strategi perang. Struktur birokrasi Kerajaan Mataram meniru pola pemerintahan Kerajaan Majapahit, di mana raja dipandang sebagai dewa-raja. Baik Mataram maupun Majapahit menerapkan karakteristik birokrasi tradisional yang didasarkan pada pengelolaan rumah tangga kerajaan.

Sistem ini digunakan untuk menyatukan wilayah-wilayah dengan mengandalkan hubungan kekeluargaan, kepercayaan religio-magis, sistem upeti atau pajak, serta kekuatan militer pusat untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Melalui pendekatan ini, integrasi wilayah-wilayah di sekitar kerajaan secara bertahap terbentuk, menciptakan satu kesatuan negara. (Zamzami, 2018)

Dalam catatan sejarah, Kerajaan Mataram didirikan di Kotagede, yang terletak di tenggara Yogyakarta, pada tahun 1582. Kerajaan ini memiliki peran signifikan dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini menunjukkan semangat para raja yang mengislamkan penduduk di wilayah mereka dan memperluas wilayah mereka. hingga partisipasi para pemimpin agama dan perkembangan budaya Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Pajang adalah penguasa kerajaan mataram sejak awal. Setelah berhasil menekan Arya Penangsang, Ki Ageng Pamanahan menjadi Adipati Mataram selama pemerintahan Sultan Adiwijaya di Pajang. Setelah itu, Mataram dirancang untuk menjadi pemukiman dan peternakan. Pada tahun 1528, Sutawijaya menang dalam peperangan sengit untuk menjadi raja setelah diangkat menjadi Adipati Mataram. Ki Ageng Pamanahan adalah ayah dari Sutawijaya. (Maulia et al., 2022)

Perwakilan rakyat Madura menerima dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang-orang Makassar yang merasa kecewa terhadap Amangkurat I setelah permintaan mereka untuk mendapatkan tanah ditolak oleh sang raja. Pasukan Makassar dipimpin oleh Kraeng Galesong. Selain itu, bantuan juga datang dari Sultan Agung Tirtayasa dan Sunan Giri, yang memandang Amangkurat I sebagai pengkhianat karena telah bersekutu dengan pihak kafir. (Rahayu, 2016)

Sukses kepemimpinan di Kerajaan Mataram yang terus berganti tidak selalu menghasilkan raja yang ideal, sehingga ideologi raja suci tidak mampu berfungsi sebagai kontrol yang efektif, terutama bagi wilayah vasal di Pesisir Utara Jawa yang letaknya jauh dari pusat kerajaan. Untuk mengatasi hal ini, Mataram berusaha membangun konsensus politik dengan wilayah tersebut. Namun, konsensus politik tersebut sebenarnya hanya tampak di permukaan karena Susuhunan Amangkurat I telah memusatkan kekuasaan. Segera setelah naik takhta, ia memperkuat kekuasaannya dengan menyingkirkan atau mengasingkan para pejabat senior Mataram yang tidak sejalan dengan kebijakannya. (Budaya & Mada, n.d.)

Faktor utama di Madura adalah bahwa semua bentuk pemerintahan dijalankan atas nama Cakraningrat I, sementara sistem pemerintahannya dioperasikan oleh keluarga kerajaan. Pada saat yang sama, kepemimpinan Amangkurat I, ayah dari adipati anom, berusaha digulingkan oleh

putranya. Hubungan antara Amangkurat I dan adipati anom mulai memburuk setelah sebuah peristiwa penting, yaitu terbunuhnya Pangeran Pekik, yang memicu perselisihan antara keduanya. (Qalbiyah & Wijaya, 2024)

Pemerintahan Amangkurat I di Keraton Plered dipenuhi dengan berbagai intrik dan konflik. Puncak dari kekacauan ini terjadi saat Trunajaya melancarkan serangan ke Keraton Plered, yang akhirnya memaksa Amangkurat I melarikan diri hingga wafat di Tegalarum. (Pratama, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian study literatur dari beberapa artikel, skripsi, karya tulis ilmiah lainnya, penulisan ini berfokus pada pendapat para ahli. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konflik internal dan eksternal dalam politik Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Amangkurat I melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber-sumber tertulis.

Selanjutnya, literatur pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan buku Jejak Mataram Islam Di Yogyakarta karya V. Wiratna Sujarweni (2022). Selain itu literatur pendukung lainnya kutipan – kutipan dari Babad Tanah Jawi, Yang berkaitan dengan kajian ini. Babad Diponegoro Sebagian mengutip dari pada kutipan yang ada di buku Babad Diponegoro.

Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoraborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. (antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC Dan Sultan Haji & Herlina, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan politik pada masa pemerintahan Amangkurat I banyak menghasilkan kebijakan – kebijakan yang membuat kontroversial, Pada tahun 1646 M, Susuhunan Amangkurat I, putra sekaligus penerus Sultan Agung, menjalin perjanjian damai dengan VOC di Batavia. Amangkurat I memilih pendekatan yang lebih damai terhadap Batavia. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pemerintah Batavia setuju untuk mengirimkan utusan guna mengupayakan perdamaian dan menawarkan bantuan kepada Susuhunan jika diperlukan. Sebagai konsekuensi, Batavia diwajibkan mengirimkan utusan setiap tahun, membawa hadiah dan barang dagangan dari mancanegara biasanya berupa komoditas dari berbagai wilayah dunia— sesuai permintaan Susuhunan. (Zamzami, 2018)

Amangkurat I mendapatkan warisan wilayah Mataram dari ayahnya Sultan Agung yang sangat luas. Ayahandanya yang telah membangun keraton Kerto yang terbuat dari bahan kayu, bagi Amangkurat I lebih memilih untuk meninggalkan istana tersebut, Selain itu, ibu kota dipindahkan, dan sebuah istana baru yang lebih megah, dibangun dari bata merah, didirikan di Pleret. Keraton Pleret bisa dikatakan lahir dari ambisi seorang putra yang enggan tinggal di tempat kediaman ayahnya. Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan tentang pembangunan Keraton Pleret, di mana Amangkurat I, setelah naik takhta, bersabda: “Seluruh rakyatku, buatlah batu bata! Aku akan pindah dari Kerta, karena aku tidak ingin tinggal di bekas kediaman ayahanda. Aku akan membangun kota di Pleret.”

Amangkurat I memerintahkan penyingkiran tokoh-tokoh senior dan ulama yang berjasa tetapi tidak sejalan dengan pandangan politiknya. Salah satu korban dari kebijakan ini adalah Pangeran Pekik dari Surabaya, yang juga merupakan mertuanya sendiri. Karena kecenderungan Amangkurat I terhadap wanita, Pleret menjadi saksi berbagai kisah cinta yang tragis. Salah satunya adalah cerita tentang Nyi Truntum (Ratu Malang). Dalam perjuangannya, langkah dan tindakan utamanya difokuskan untuk menghancurkan sekutu Penguasa Alit melancarkan pembantaian terhadap banyak menteri, sementara muncul spekulasi bahwa Amangkurat I memandang para ulama dan santri sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Pada tahun 1647 M, sekitar 5.000 hingga 6.000 ulama beserta keluarga mereka dieksekusi atas perintahnya. Tanpa memerlukan gelar tambahan sebagai

"Penguasa," Amangkurat I menghadapi kembali pemberontakan pada tahun 1677 M dan 1678 M. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Raden Kejoran, seorang tokoh spiritual berpengaruh. Perlawanan ini akhirnya menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Keraton Mataram. (Iswanto, 2021), dari pendapat diatas bahwa Amangkurat I memiliki polemik – polemik politik di internal maupun di eksternal, tidak lain dan tidak bukan demi menjalankan kekuasaannya agar tidak ada halangan, Amangkurat I menghalalkan segala cara demi jabatannya. Kediktatoran Amangkurat I membuat daerah – daerah di sekitarnya merencanakan pemberontakan.

Para sejarawan mencatat bahwa Amangkurat I memiliki dua permaisuri dan lebih dari 40 selir. Namun, meskipun telah memiliki banyak selir, Amangkurat I masih menyelingkuhi dan bahkan mengambil paksa istri orang lain yang menarik perhatiannya. Salah satu kasus pertama adalah ketika ia jatuh hati pada seorang perempuan yang kemudian dikenal sebagai Ratu Malang. Perempuan tersebut awalnya adalah istri seorang dalang bernama Kiai Dalem, tetapi Amangkurat I, yang sudah terikat, memanfaatkan kekuasaannya untuk membawa Ratu Malang ke istana, meskipun saat itu ia sedang hamil dua bulan dari pernikahannya. Amangkurat I menjadi sangat tergilagila pada Ratu Malang, yang akhirnya menjadi selir paling disayangi di istana.

Hal ini memicu kecemburuan di antara para selir lainnya. Namun, Ratu Malang wafat dalam kondisi yang mencurigakan. Amangkurat I menuduh para dayang dan pelayan istana meracuninya. Sebagai hukuman, ia mengurung mereka di ruangan gelap tanpa makanan hingga meninggal. Kematian Ratu Malang membuat Amangkurat I tenggelam dalam kesedihan mendalam. (Fuadi, 2022), dari kutipan diatas Amangkurat I selalu tidak puas dengan satu wanita, ia selalu ingin selalu banyak wanita sampai – sampai mengambil istri orang salah satu kasus nya adalah ketika ia menyukai seorang perempuan yang dikenal sebagai Ratu Malang. Pada mulanya adalah istri dari dalang yang bernama Kiai Dalem, karena Amangkurat I mempunyai kuasa dan sekaligus raja Mataram Islam Amangkurat I tidak segan – segan memboyong istri dari dalang tersebut, lalu dalang tersebut sekaligus suami dari Ratu Malang, dibunuh oleh Amangkurat I beserta sinde – sinden nya.

Kebijakan sosial Amangkurat I menjadi salah satu pemicu pecahnya perang, seperti perintahnya untuk membunuh keluarga Pangeran Pekik di Surabaya yang berawal dari persoalan perempuan yang dipinang oleh putranya, Adipati Anom. Selain itu, pembantaian sekitar 6.000 ulama beserta keluarga mereka di alun-alun Plered, yang hanya didasarkan pada kecurigaan tanpa alasan jelas, juga menjadi contoh tindakan kontroversialnya. Dengan gaya kepemimpinan, sifat, dan pilihan politik seperti yang telah dijelaskan, muncul seorang pemuda asal Madura yang berani melawan tindakan dan sifat Raja Mataram tersebut.

Perjuangannya dilakukan demi kejayaan Mataram dan kesejahteraan rakyat, karena ia tidak tega melihat rakyat kecil terus menjadi korban ambisi sang raja. Perjuangan ini kemudian dikenal sebagai Perang Trunojoyo, Adipati Anom memanggil Raden Kejoran, yang juga dikenal sebagai Panembahan Rama, untuk meminta pendapatnya. Raden Kejoran adalah keturunan Sayid Kalkum atau Pangeran Wotgaleh, yang juga dikenal sebagai Panembahan Mas di Kejoran. Sayid Kalkum merupakan saudara Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat, tokoh dari keluarga yang telah lama menentang kekuasaan Mataram. Sebagai seorang ulama Islam, Raden Kejoran sangat peduli pada hal-hal spiritual dan dianggap keramat serta sakti oleh penduduk setempat, hingga mereka gemetar saat menyebut namanya. Speelman, dalam catatannya, menyebut Raden Kejoran secara keliru sebagai pengusir hantu dan ahli ramal. Raden Kejoran yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama jelas tidak menyetujui tindakan sewenang-wenang Amangkurat I, termasuk pembunuhan para ulama yang pernah dilakukan oleh sang raja.

Untuk melaksanakan keinginannya, Adipati Anom meminta saran dari Raden Kejoran. Namun, karena faktor usia, Raden Kejoran merasa tidak sanggup memimpin di garis depan dan merekomendasikan Trunojoyo. Mendengar usulan tersebut, Adipati Anom segera memanggil Trunojoyo.

Akhirnya, kedua bangsawan tersebut sepakat untuk memulai pemberontakan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan pemerintahan Amangkurat I, alasan mereka berbeda. Adipati Anom ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya demi merebut takhta Mataram, sementara

Trunojoyo didorong oleh keinginan untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, dan memulihkan kejayaan Mataram. Perbedaan tujuan ini kemudian menjadi penyebab perpecahan di antara keduanya. Saat Trunojoyo kembali ke Madura, ia disambut dengan hangat oleh masyarakat. Ketika ia mulai membangun pasukan dan menyampaikan tujuannya, masyarakat dengan antusias mendukungnya, karena telah lama menderita akibat tindakan sewenang-wenang raja. (Romli, 2023), dari kutipan diatas karna keadaan politik dan kebijakan – kebijakan Amankurat I maka banyak tokoh – tokoh ingin memberontak nama yang terkenal dalam peristiwa tersebut adalah Trunojoyo, dampak dari pemberontakan tersebut adalah mulai runtuhnya kekuasaan Amangkurat I yang berakhir Amangkurat I melarikan diri ke Tegalarum, daerah yang sekarang bernama Tegal, lalu Amangkurat I meninggal di Tegal dan dimakamkan di Pasarean Tegalarum.

PENUTUP

Pada masa pemerintahan Raja Amangkurat I, Kerajaan Mataram Islam menghadapi konflik yang kompleks, baik internal maupun eksternal, yang berdampak besar pada stabilitas kerajaan. Secara internal, Amangkurat I menghadapi perselisihan dengan bangsawan dan keluarga kerajaan yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakannya yang otoriter. Kebijakan sentralisasi kekuasaan yang ia terapkan menciptakan ketegangan dengan para elit dan tokoh-tokoh agama yang merasa terancam posisinya.

Di sisi eksternal, Mataram Islam juga menghadapi tantangan dari kolonialisme Belanda, yang mulai menunjukkan pengaruh kuat di Nusantara. Hubungan yang tidak stabil antara Amangkurat I dan Belanda menimbulkan konflik, karena Amangkurat I merasa perlu bekerja sama tetapi juga merasa waspada terhadap ambisi Belanda yang dapat merongrong kedaulatan kerajaannya.

Kombinasi konflik internal dan tekanan eksternal ini memperlemah Kerajaan Mataram Islam, mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elit, serta memicu pemberontakan, seperti pemberontakan Trunajaya yang memperparah situasi. Pada akhirnya, konflik-konflik ini menandai awal kemunduran pengaruh Mataram Islam di Nusantara dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan lokal dalam menghadapi kolonialisme dan konflik internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisijanti, I. (2015). Pengembangan Maket Pusat-Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah (Development of mock-ups of Islamic Mataram Kingdom Government Centers as an Alternative History Learning Media). *Nosarara : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1–29.
- antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC Dan Sultan Haji, K., & Herlina, N. (2024). Konflik Antara Sultan Ageng Tirtayasa Dengan Voc Dan Sultan Haji. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial Dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal*, 3(1), 30– 34.
- Aulia Arif Rahman. (2012). Islam Dan Budaya Masyarakat Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. *EI-HARAKAH (TERAKREDITASI)*.
- Budaya, F. I., & Mada, G. (n.d.). *Empat Pejabat Tinggi Pesisir : Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada Pertengahan Abad ke-17*. Fuadi, M. A. (2022). Perspectives on Islam and Prostitution: a Historical Study of Prostitution Practices and Arguments of Social Fiqh Reason. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 88–110. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2219>
- Iswanto, J. (2021). Pertumbuhan Institusi Sosial Politik Samudera Pasai, Malaka, Banten Dan Mataram. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.46>
- Kepada, D., & Adab, F. (2008). *Skripsi*. Maulia, S. T., Hendra, H., & Ichsan, M. (2022). Jejak Perkembangan Islam Pada Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 77–84. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.22477>

- Pratama, F. (2019). Situs Kraton Plered Sebagai Media Pembelajaran Rekonstruksi Sejarah. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v1i1.1478>
- Qalbiyah, S., & Wijaya, D. N. (2024). VOC dan Dinamika Kekuasaan di Sumenep Abad XVIII : Sebuah Tinjauan Historis. 7, 225–241.
- Rahayu, I. D. (2016). Pergeseran Kesultanan Sumenep Ke Tangan Voc Tahun 1624-1705. *Avatara*, 4(3), 1084–1094.
- Romli, M. (2023). The power and morals of prince trunojoyo madura. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(5), 188. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/1636>
- Siswanta, S. (2019). Sejarah Perkembangan Mataram Islam Kraton Plered. *KARMAWIBANGGA: Historical Studies Journal*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/10.31316/fkip.v2i1.329>
- Zamzami, R. (2018). Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.30829/j.v2i2.1519>